

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

OLEH :

**RUTH KURNIANTI SITORUS
208520058**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SIMPANG EMPAT
KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

RUTH KURNIANTI SITORUS
NPM 208520058

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN

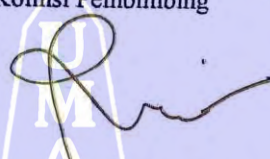
Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan dalam
Penanggulangan Kemiskinan di Desa Simpang Empat
Kabupaten Asahan

Nama : Ruth Kurnianti Sitorus

NPM : 208520058

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Pembimbing



Dr. Walid Mustafa S. S.Sos, M.I.Pol
Dekan



Khairunnisah Lubis, MAP
Ketua Prodi

HALAMAAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 17 September 2024

Ruth Kurnianti Sitorus
208520058

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruth Kurnianti Sitorus
Npm : 208520058
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal 9 September 2024
Yang Menyatakan



Ruth Kurnianti Sitorus

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan dan faktor penghambat dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah George C. Edwards III (2006) ada empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian ialah melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan segi komunikasi belum berhasil karena masih minim pengetahuan penerima program PKH terhadap Program Keluarga Harapan. Kebijakan segi sumber daya telah terlaksana dengan baik. Kebijakan segi disposisi yang dilaksanakan oleh Koordinator/Pendamping Sosial telah menunjukkan sikap yang baik terhadap masyarakat Desa Simpang Empat khususnya bagi yang mendapatkan program PKH. Kebijakan segi struktur birokrasi para Koordinator Pendamping Sosial telah mengerti dan mengetahui mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Simpang Empat.

Kata Kunci : Kemiskinan, PKH, Implementasi

ABSTRACT

Program Keluarga Harapan is a program created by the government in the form of conditional cash assistance provided to Keluarga Penerima Manfaat (KPM) with the aim of reducing poverty and improving the quality of life of the community. This study aimed to determine the extent of the implementation of the Program Keluarga Harapan in tackling poverty and the inhibiting factors in executing the Family Hope Program in Simpang Empat Village, Asahan Regency. The theory used in this research was George C. Edwards III (2006), which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method employed was a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, documentation, and qualitative analysis. The results showed that the communication aspect of the policy was not successful, as the knowledge of PKH recipients about the Family Hope Program was still lacking. The resource aspect of the policy had been well-executed. The disposition aspect of the policy, carried out by the Coordinators/Social Assistants, showed a positive attitude toward the community in Simpang Empat Village, especially those who received the PKH program. The bureaucratic structure aspect of the policy indicated that the Coordinators and Social Assistants understood and were familiar with the mechanism for implementing the Program Keluarga Harapan (PKH) in Simpang Empat Village.

Keywords: Poverty, PKH, Implementation



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan pada tanggal 11 Juli 2002 dari Ayah Aris Sitorus dan Ibu Ester Minauli Saragih. Penulis merupakan putri kedua dari ketiga bersaudara.

Penulis memulai pendidikan awal di Sekolah Taman Kanak (TK) Bina Karya Kecamatan Simpang Empat, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 010035 Simpang Empat, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Simpang Empat, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Swasta Tritunggal Kota Tanjung Balai.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada ibu Khairunnisah Lubis, S. Sos, M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini serta Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA yang telah memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Dodi Riza Pohan, S.T selaku Kepala Desa Simpang Empat dan Kordinator PKH yaitu Ibu Dewi Sucinta yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah saya yaitu Aris Sitorus, ibu saya Ester Minauli Br Saragih, kakak saya Lewi Ariani Sitorus S.Pd, dan adik saya Rapael Sitorus yang sudah memberikan materi, doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun Masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



(Ruth Kurnianti Sitorus)
NPM 208520058

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Teoritis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Implementasi	9
2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.2 Kemiskinan	18
2.2.1 Faktor-faktor Kemiskinan	19
2.2.2 Bentuk-bentuk Kemiskinan	20
2.3 Program Keluarga Harapan	22
2.3.1 Hak dan Kewajiban Program Keluarga Harapan	24
2.3.2 Tujuan Program Keluarga Harapan	25
2.3.3 Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan	25
2.3.4 Kriteria Penerima PKH	26
2.4 Konsep Penanggulangan Kemiskinan	28
2.5 Penelitian Terdahulu	29
2.6 Kerangka Berpikir	32
III. METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Waktu Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Informan Penelitian	34

3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6	Teknik Analisi Data.....	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Hasil Penelitian.....	40
4.1.1	Gambaran Lokasi Penelitian	40
4.1.2	Visi dan Misi Pemerintah Desa Simpang Empat	43
4.1.3	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simpang Empat.....	45
4.2	Pembahasan.....	49
4.2.1	Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan	49
4.2.2	Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Simpang Empat	73
V. PENUTUP.....		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN.....		80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin 2021-2023 di Sumatera Utara.....	1
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa di Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023	4
Tabel 3. Jumlah Penerima Bantuan PKH di Desa Simpang Empat	4
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 5. Rincian Waktu Penelitian	34
Tabel 6. Daftar Informan Penelitian	36
Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan Pada Tahun 2023	43
Tabel 8. Skema Bantuan PKH di Desa Simpang Empat Pada Tahun 2024.....	66
Tabel 9. Daftar Nama Pendamping PKH di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir	34
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara	41
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simpang Empat	48
Gambar 4. Kartu Keluarga Sejahtera dan Buku Pembelajaran PKH di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan Pada Tahun 2024	62



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	80
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian	82
Lampiran 3. Surat Keterangan Pelaksanaan Riset	83
Lampiran 4. Deskripsi Hasil Wawancara.....	84
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	94



DAFTAR SINGKATAN

BLT	: Bantuan Langsung Tunai
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
PKH	: Program Keluarga Harapan
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang memiliki kekurangan uang, tingkat pendapatan rendah, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Seseorang atau keluarga yang miskin dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor ini termasuk mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak memiliki kesempatan kerja, terkena PHK, tidak memiliki jaminan sosial (pensiun, kesehatan, dan kematian), atau tinggal di daerah terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas (Suharto, 2010).

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, terdapat jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang dari September 2022. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan 1,27 juta pada tahun 2021 menjadi 1,26 juta dari September 2022 hingga mengalami penurunan menjadi 1,24 juta jiwa pada Maret 2023.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin 2021-2023 di Sumatera Utara

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000) (Jiwa)
1.	2021	1,343,86
2.	2022	1,268,19
3.	2023	1,239,71

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, 2023

Pemerintah melakukan upaya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang diberikan secara langsung kepada penduduk miskin, contoh; bantuan langsung tunai (BLT), raskin, telur, minyak goreng, sedangkan kebijakan tidak langsung, contoh; program jamkesmas, program IDT, program Kartu Indoensia Pintar (KIP), program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Dana BOS. Walaupun telah dilakukan beberapa upaya umum kemiskinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai hampir seluruh wilayah baik perkotaan maupun pedesaan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan maksud dan tujuana meningkatkbn kesejahteraan serta kualita dan kelangsungan hidup masyarakat miskin.

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penangulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program yang memberikan bantuan uang tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin (KSM) dan sebagai imbalannya keluarga sangat miskin (KSM) tersebut diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat 3 komponen yaitu : kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Peneliti akan berfokus pada 3 komponen PKH yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Dalam kesejahteraan sosial terdapat lanjut usia dan disabilitas, kesehatan terdapat ibu hamil/menyusui dan anak usia dini (0-6 tahun) dan pada pendidikan terdapat anak wajib belajar SD, SMP, dan SMA. Pada tahun 2007 Kementerian Sosial Rakyat Indonesia mengeluarkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dana bantuan langsung tunai diberikan 4 kali pertahunnya, yakni pada bulan januari, april, juli, dan oktober bantuan yang disalurkan melalui Bank BRI dan Kantor Pos. Dalam pelaksanaan penyaluran tidak hanya bantuan langsung tunai yang berupa uang akan tetapi ada juga bantuan langsung non tunai yaitu berupa sembako.

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui sistem perbankan yang menjadi perantara antara pemerintah dengan keluarga penerima manfaat. Setiap Keluarga Penerima Manfaat akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan berfungsi sebagai kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH), serta kartu ATM yang akan berfungsi sebagai kartu debit yang akan dihubungkan dengan rekening tabungan. Lebih lanjut, setiap penerima manfaat akan segera memperoleh nomor rekening tabungan, skema ini memberikan prospek bagi berkembangnya akses layanan keuangan (*financial inclusion*). Mekanisme penarikan berjenjang sedang diterapkan, artinya uang tidak dapat ditarik sekaligus. Mengedukasi warga tentang cara menabung dan mengelola keuangan dengan baik adalah bagian dari program ini (Kementerian Sosial, 2021: 29).

Implementasi PKH di Kabupaten Asahan dilaksanakan pada tahun 2013 (jurnal.muhammadfirmansiregar) yang terdiri dari 13 Kecamatan. Simpang Empat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia yang memiliki 8 Desa yaitu Silomlom, Perkebunan Sukaraja, Simpang Empat, Sei Dua Hulu, Perkebunan Hessa, Sungai Lama, Sipaku Area, Anjung Ganjang. Jumlah penduduk di Desa Simpang Empat sebanyak 16 730 ribu orang.

Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan Desa di Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023

No.	Desa	Penduduk (Jiwa)
1.	Silomlom	3 724
2.	Perkebunan Sukaraja	1 507
3.	Simpang Empat	16 730
4.	Sei Dua Hulu	5 958
5.	Perkebunan Hessa	2 041
6.	Sungai Lama	8 409
7.	Sipaku Area	7 942
8.	Anjung Ganjang	2 028

Sumber: Badan Pusat Statistik, Asahan

Tabel di atas menjelaskan bahwa Desa Simpang Empat memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dari delapan (8) desa yang ada di Kecamatan Simpang Empat. Desa Simpang Empat dihuni oleh penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani, pedagang, serta yang memiliki tingkat kehidupan yang masih memprihatinkan. Desa Simpang Empat merupakan desa yang menerima jumlah PKH terbanyak yaitu 92 peserta (dataset, asahan).

Tabel 3. Jumlah Penerima Bantuan PKH di Desa Simpang Empat

No.	Tahun	Jumlah Penerima PKH
1.	2021	321 KPM
2.	2022	329 KPM
3.	2023	334 KPM

Sumber: Data sp2d 2023 (Surat perintah pencairan dana)

Tabel jumlah penerima bantuan PKH diatas menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah penerima PKH sebanyak 321 keluarga penerima manfaat (KPM), dan persentase penduduk miskin diketahui pada tahun 2022 meningkat sebanyak 8 keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga ada 329 keluarga penerima manfaat (KPM), dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan PKH meningkat yaitu sebanyak 334 keluarga penerima manfaat (KPM).

Permasalahan yang terdapat di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan adalah belum meratanya pembagian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) disebabkan oleh adanya pembatasan kuota penerima bantuan yang ditentukan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan ada juga beberapa keluarga yang belum terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), oleh karena itu masih ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut dialami oleh masyarakat miskin di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan yang belum bisa atau tidak masuk kedalam data pemerintah pusat maka belum meratanya pembagian bantuan. Hal lain menunjukkan bahwa berdasarkan dari hasil verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh pendamping program keluarga harapan (PKH) Desa Simpang Empat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) masih di temukan peserta program keluarga harapan (PKH) yang tidak memenuhi syarat, sementara di sisi lain ada masyarakat yang memenuhi syarat sebagai peserta PKH namun tidak masuk di data penerima PKH tersebut. Banyak masyarakat mengeluh kenapa hal itu terulang tiap tahun dikarenakan mereka pantas mendapatkan

bantuan dan tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun tidak dapat menerima program tersebut. Selanjutnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa program PKH merupakan bantuan sosial bersyarat dan memiliki tiga kategori.

Permasalahan lainnya ialah kurang berkompeten dalam pembagian program PKH, disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan dengan warganya sehingga lebih mengutamakan pihak keluarganya sementara program tersebut masih ada yang sangat membutuhkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pembagian program PKH belum bisa dikatakan merata khususnya bagi warga miskin yang seharusnya merekalah yang berhak untuk mendapatkan program tersebut. Permasalahan lainnya yang muncul di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan ialah ada juga beberapa keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang kurang memahami tentang program keluarga harapan (PKH). Hal ini menjadi faktor yang paling sering terjadi didalam masyarakat.

Upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langka koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, untuk perbaikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan diperlukan program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan. Demi mewujudkan program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan, perlu menetapkan program keluarga harapan sebagai bantuan sosial bersyarat bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengambil judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan?
2. Apa faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan (implementasi) dari Program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan.

1.4 Manfaat Teoritis

Sebuah penelitian harus memiliki manfaat yang jelas. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis,

Dengan menulis karya ilmiah ini, peneliti dapat meningkatkan kemampuan berpikir serta memperoleh wawasan dan informasi tentang pokok bahasan yang sedang dipelajari.

2. Secara praktis,

Dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat, khususnya bagi Desa Simpang Empat, serta mendorong masyarakat umum untuk lebih memperhatikan kesejahteraan keluarga karena merupakan tanggung jawab bersama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditentukan atau dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana implementasi adalah sebuah aspek terpenting dalam proses kebijakan.

Mulyadi mengartikan bahwa implementasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut ke dalam pola operasional dan upaya untuk mencapai perubahan, besar atau kecil, seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya adalah memahami apa yang terjadi setelah suatu program diimplementasikan. (Mulyadi, 2015).

Secara etimologis, Implementasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah proses interaksi antara penetapan tujuan dan pelaksanaan tindakan untuk mencapainya. Oleh karena itu, esensi dasar implementasi adalah membangun “hubungan” dan rantai sehingga kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan. implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. (Nawi, 2018).

Tatanan praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting, yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Sejalan dengan pendapat Udoji, George Edward III (Winarno, 2014) berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentuk program dan dampak kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai suatu proses penerapan dan pelaksanaan rencana, ide, kebijakan, atau strategi kedalam tindakan nyata agar tercapainya suatu tujuan.

2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:101) implementasi kebijakan publik merupakan suatu tahap dalam pengambilan keputusan antara perumusan kebijakan, seperti pasal-pasal undang-undang legislatif, penerbitan peraturan eksekutif, pengesahan putusan pengadilan atau penerbitan standar peraturan, dan konsekuensi hasil kebijakan bagi suatu masyarakat yang mempengaruhi aspek kehidupan.

Menurut Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Menurut George C. Edwards III (2006:150) studi implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tetap atau dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin mengalami dalam kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam upaya bersama-sama menghasilkan tujuan. Untuk

menilai keberhasilan suatu kebijakan diperlukan suatu studi, khususnya studi implementasi kebijakan.

Pendekatan yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communicattions*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Ke-empat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan dengan cara diturunkan (*breakdown*) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor.

Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Keseragaman serta konsistensi terhadap ukuran

dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga implementor dapat memahami secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks. Seseorang biasa menggunakannya atau menyebarkan hanya untuk kepentingan tertentu. Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif, tentunya ada yang bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus memahami apakah mereka dapat melaksanakannya. Bahwasanya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak dan personel agar dapat memahami secara jelas dan akurat terkait dengan maksud dan tujuan kebijakan. Jika ada aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak memahami tentang apa yang sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan merasa bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang efektif dan optimal. Kurangnya komunikasi kepada para implementor secara serius akan berdampak pada implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan,

serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Bukan suatu masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi program dan akuratnya komunikasi yang dikirim, apabila personel yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program mengalami kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya, maka sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik.

Dengan demikian, Jika jumlah personil pelaksana kebijakan terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan. Kurangnya kemampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan skill yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik tentang kelistrikan.

Informasi merupakan bagian sumber daya yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang terkait bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksanaan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah

dan Undang-Undang bukti dilapangan menunjukkan bahwa tingkat pusat kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Kurangnya informasi dan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti para oknum pelaksana tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikannya, kemudian pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan masalah baru.

Implementasi kebijakan membutuhkan ketaatan organisasi dan individu pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Selain itu, Sumberdaya yang dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk mengatur/membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan kantor, serta dana yang mencukupi tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah

penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud sasaran program namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat dikarenakan mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara diam mereka alihkan dan menghindari implementasi program tersebut. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana juga sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat berdampak pada pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif. wujud dari dukungan pimpinan ini adalah dengan menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, menempatkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, serta memperhatikan keseimbangan daerah, agama, jenis kelamin, suku, dan karakter demografi yang lain. selain itu, indikator ini menyediakan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksanaan program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.

- b. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sud unit dan proses-proses dalam badan pelaksana.
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif).
- d. Tingkat komunikasi “terbuka” yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
- e. Vitalitas suatu organisasi
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal ketika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implemetasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah di rumuskan sebelumnya demi tercapainya suatu tujuan. Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal ketika struktur birokrasi yang ada

menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

2.2 Kemiskinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang kemiskinan, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang telah ada sejak manusia itu ada. Kemiskinan memiliki banyak segi dan akan selalu menjadi persoalan dari masa ke masa.

Kemiskinan menurut Suparlan (1995), didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan

hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya.

Kemiskinan muncul karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan adanya perbedaan pada tingkat upah, serta adanya perbedaan dalam pemenuhan modal, sehingga kemiskinan dapat digambarkan pada teori lingkaran kemiskinan (Imelia, 2012). Konsep ini cukup luas cakupannya dan beragam sehingga seringkali kurang terukur, termasuk Indonesia, seringkali gagal mengukur kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

2.2.1 Faktor-faktor Kemiskinan

Kartasmita menyatakan dalam (RatnaSari & Firdayetti, 2019) keadaan kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Rendahnya kualitas pendidikan, tingkat pendidikan menyebabkan terbatasnya keterampilan pengembangan diri dan menyebabkan terbatasnya memanfaatkan peluang dalam mendapatkan dunia pekerjaan.
2. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah, menyebabkan stamina fisik, kemampuan berpikir dan inisiatif yang rendah.
3. Keterbatasan lapangan pekerjaan, selain dari kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk, kemiskinan juga diperburuk oleh terbatasnya kesempatan kerja. Selama masih ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, dan masih ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

4. Kondisi terisolasi banyak masyarakat miskin yang tidak berdaya secara ekonomi karena terisolasi dan terpencil. Karena tinggal di daerah terpencil sehingga sulit atau tidak terjangkau bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan layanan kemajuan lainnya.

2.2.2 Bentuk-bentuk Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan, pakaian, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan. Kebutuhan dasar minimum dapat dipahami sebagai ukuran keuangan dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum untuk kebutuhan dasar disebut garis kemiskinan. Penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan tergolong miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan dimana dampak kebijakan pembangunan belum menjangkau semua lapisan masyarakat membuat satu orang lebih miskin dari yang lain (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Bentuk-bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan *absolut*

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah

menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan *relative*

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negara negara pemberi bantuan pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia.

4. Kemiskinan Situasional atau kemiskinan natural

Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin.

5. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat VERSITAS ISLAM adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain

2.3 Program Keluarga Harapan

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu, dan sebagai syarat atau imbalannya, RTSM penerima program harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. PKH bukan pengganti atau kelanjutan dari BLT/SLT, dan bukan salah satu unit kegiatan dari PNPM. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik. Landasan Hukum pemberian Program Keluarga Harapan adalah:

Permensos Nomor I Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan :

1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
3. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
4. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
5. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa ;

- a. Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan,

sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan.

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program yang dibuat oleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat, terutama adalah masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin. Demi kesejahteraan masyarakat maka Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dibuat dari tahun 2007 yang diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015.

2.3.1 Hak dan Kewajiban Program Keluarga Harapan

Bantuan PKH diberikan kepada ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah dan penyandang disabilitas yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Kewajiban dari penerima program ini adalah peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi, dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah serta untuk komponen kesejahteraan

sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. (Kemensos RI, 2022).

2.3.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan terdiri atas:

- a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah tangga sangat miskin;
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah tangga sangat miskin;
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari rumah tangga sangat miskin;
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi Rumah tangga sangat miskin.

Program Keluarga Harapan bukan merupakan kelanjutan atau pengganti program bantuan langsung tunai (BLT) 2005/2006 sebagai kompensasi kenaikan BBM, tapi untuk memberdayakan kaum ibu dari kalangan miskin agar mampu berusaha dan mendorong anak tetap sehat dan bersekolah.

2.3.3 Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang

bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: nenek, tante/ bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH.

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan program keluarga harapan (PKH) bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan program keluarga harapan (PKH) bagi Ibu Hamil.

2.3.4 Kriteria Penerima PKH

Pemberian bantuan PKH dilakukan setiap tahun dengan jadwal pencairan yang menjadi tahap empat. Meski belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial terkait jadwal pencairan PKH tahap 1 tahun 2024, namun berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penyaluran bansos PKH tahap 1 biasanya dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Maret. Penerima bantuan PKH harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan identifikasi melalui e-KTP.

2. Terdaftar sebagai keluarga yang membutuhkan bantuan di kelurahan setempat.
3. Bukan anggota dari ASN, TNI, atau Polri.
4. Belum menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan Kartu Prakerja.
5. Nama tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.

Program Keluarga Harapan (PKH) menyediakan bantuan sosial (bansos) kepada Keluarga Miskin (KM) sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah jadwal pencairan PKH untuk tahun 2024, Merujuk pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya:

- a. Tahap 1: Januari-Maret
- b. Tahap 2: April-Juni
- c. Tahap 3: Juli-September
- d. Tahap 4: Oktober-Desember

Besaran bantuan PKH bervariasi untuk setiap kategori penerima, termasuk ibu hamil/nifas, anak usia dini/balita, lansia, penyandang disabilitas, anak sekolah SD, anak sekolah SMP, dan anak sekolah SMA. Berikut adalah contoh besaran bantuan untuk tahun 2023:

- a. Ibu hamil/nifas: Rp 750.000/tahap atau Rp 3 juta/tahun
- b. Anak usia dini/balita: Rp 750.000/tahap atau Rp 3 juta/tahun
- c. Lansia: Rp 600.000/tahap atau Rp 2,4 juta/tahun
- d. Penyandang disabilitas: Rp 600.000/tahap atau Rp 2,4 juta/tahun

- e. Anak sekolah SD: Rp 225.000/tahap atau Rp 900 juta/tahun
- f. Anak sekolah SMP: Rp 375.000/tahap atau Rp 1,5 juta/tahun
- g. Anak sekolah SMA: Rp 500.000/tahap atau Rp 2 juta/tahun

2.4 Konsep Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program yang dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah dan tingkat kemiskinan di suatu negara atau masyarakat. Hal ini termasuk upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan memberikan dukungan langsung kepada keluarga dan individu yang berada dalam kemiskinan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan individu, keluarga, dan kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi rendah atau rentan.

Menurut Muttaqin (2010), kedua aspek pengentasan kemiskinan tersebut saling berkaitan. Pertama, dimensi ini melibatkan pendekatan komprehensif untuk memahami akar penyebab kemiskinan, termasuk aspek struktural ekonomi, sosial budaya, dan politik. Selain itu, pengentasan kemiskinan juga berperan dalam mengubah paradigma sosial untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam mengungkap penyebab kemiskinan, kita perlu melakukan lebih dari sekedar mengatasi gejala kemiskinan, namun juga memahami dan mengatasi faktor-faktor mendasar seperti rendahnya pendapatan, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan norma gender yang membatasi potensi perempuan. Lebih lanjut, aspek struktural politik merupakan bagian penting dalam distribusi kekuasaan dan akses terhadap kebijakan publik, yang berdampak pada kesejahteraan suatu masyarakat.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan survei yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mengumpulkan data dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal dan skripsi. Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rani Lestari, (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang).	Berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Kabupaten Malang dilaksanakan sejak bulan oktober 2013 dan pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai buku pedoman pelaksanaan program keluarga harapan. Selain itu pelaksanaan program keluarga harapan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin di kabupaten malang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, anak maupun balita, penyandang disabilitas, lansia dan memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan. Pelaksanaan program secara teknis dilakukan dengan	Dalam penelitian terdahulu menggunakan teori interaktif Miles Huberman dan Saldana sedangkan penulis menggunakan teori Teori George C. Edwards III (2006:150-153) serta lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten Malang sedangkan lokasi penelitian penulis di Desa Simping Empat Kabupaten Asahan.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		menyesuaikan keadaan pada lokasi pelaksanaan dan perlu juga adanya koordinasi dan komunikasi antara pelaksana PKH dan penyedia layanan untuk mempermudah proses pelaksanaan PKH di lapangan.	
2.	Wpp Mellani, (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko.	Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi PKH di Kecamatan Selagan Raya dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan dana PKH tidak digunakan sesuai tujuan yaitu untuk kesehatan dan pendidikan, pada indikator ketepatan sasaran yakni masih terdapat KPM PKH yang sudah mampu dan tidak layak menerima PKH tetapi masih mendapatkannya.	Lokasi peneliti terdahulu adalah di Kecamatan Selagan Raya sementara lokasi penulis di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan.
3.	Alexsander Yandra. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.	Temuan penelitian ini adalah PKH di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sudah dilakukan dan jumlah bantuan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, masyarakat Kelurahan Sri Meranti masih menganggap bantuan belum merata karena masih ada keluarga miskin yang	Dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan teori evaluasi William Dunn sedangkan penulis menggunakan teori teori George C. Edwards III (2006:150-153) : lokasi penelitian di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Sedangkan lokasi

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		tidak menerima dana bantuan PKH.	penelitian penulis di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan.
4.	Rahmah, (2021). Pelaksanaan PKH oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.	Pelaksanaan PKH oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah Anak Putus Sekolah Belum berjalan dengan baik dimana masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan PKH tetapi malah tidak menerimanya	Dalam penelitian Terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan jenis hukum sosiologis sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif
5.	Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, Siswidiyanto, (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto	Hasil penelitian menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Tujuan PKH juga belum mendapatkan hasil yang maksimal. Masih adanya kemiskinan, gizi buruk, ibu meninggal karena melahirkan, serta rendahnya masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Saran yang dapat dilaksanakan yakni mengevaluasi kebijakan serta pemberian penghargaan kepada perseorangan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah lokasi penulisan. Lokasi penelitian terdahulu di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sedangkan lokasi penulis di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Secara umum yang membedakan penelitian dari peneliti yang sekarang dan peneliti terdahulu ialah bahwa peneliti yang sekarang berfokus pada ketiga komponen program keluarga harapan, sedangkan sebagian dari peneliti terdahulu ada yang berfokus pada keberhasilan program keluarga harapan (PKH). Kemudian jumlah informan yang sekarang berbeda, penggunaan teori yang berbeda dari penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu dengan teori Miles Huberman dan Saldana sedangkan penulis menggunakan teori George C. Edwards III (2006:150-153), Terdapat juga perbedaan lokus antara penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Rumbai Kota Pekan Baru, Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sedangkan lokus pada penelitian ini ialah di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan. Ada juga perbedaan metode penelitian antara penelitian terdahulu dengan peneliti ialah penelitian kualitatif dengan jenis hukum sosiologi sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

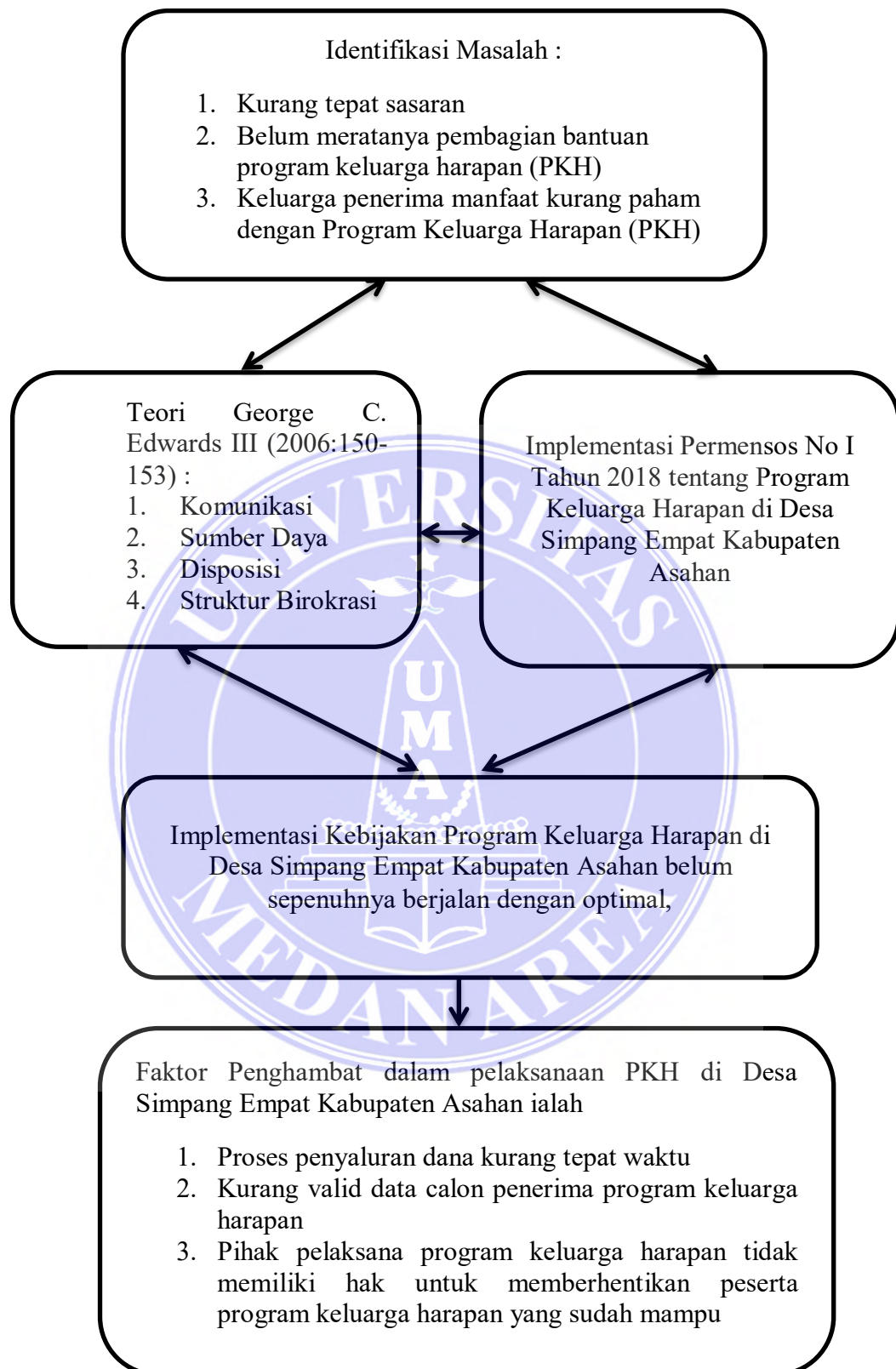
2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan di teliti. Hubungan variabel dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian oleh karena itu setiap penyusunan paradigma harus didasarkan pada kerangka berpikir. Dalam penyusunan, kerangka berpikir, peneliti memerlukan alur pola pikir ilmiah yang bersifat skeptis, analitis, dan kritis menurut Iwan Hermawan (2019).

Dari penjelasan mengenai kerangka pemikiran maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah pola pikir mengenai hubungan antara variabel atau permasalahan terhadap suatu peristiwa yang menjadi hipotesis dalam

penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah alur pikir yang berfungsi sebagai alat pikiran yang memungkinkan peneliti untuk menggali data lapangan, agar tidak menggali persepsi sendiri. Kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut Meleong (2007:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan dalam memahami fenomena yang dialami subjek penelitian yang berkaitan dengan studi tentang perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek.

Jenis penelitian deskriptif ini sering digunakan sebagai metode penelitian. Di sebuah penelitian tulisan ilmiah harus mengangkat masalah dan dijelaskan agar dapat menarik kesimpulan sesuai dengan yang diharapkan. Jenis penelitian menggunakan data kualitatif yang di deskripsikan secara deskriptif dengan menganalisis fenomena dan masalah social yang terjadi di wilayah itu dengan menampilkan hasil data yang benar-benar ada tanpa menyembunyikan hasil data tersebut.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan” sejak judul skripsi ini disetujui, ada beberapa tahapan dan rincian kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2023				2024								
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
1.	Pengajuan Judul													
2.	Penyusunan Proposal													
3.	Seminar Proposal													
4.	Perbaikan Proposal													
5.	Penelitian													
6.	Penyusunan Hasil Penelitian													
7.	Seminar Hasil													
8.	Revisi Seminar Hasil													
9.	Sidang Meja Hijau													

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

3.4 Informan Penelitian

Informan (Narasumber) adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu permasalahan yang terjadi sehingga diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat diandalkan dalam bentuk pernyataan, kenyataan atau data-data yang membantu dalam memecahkan permasalahan tersebut. Penelitian ini menentukan informan dengan teknik purposive sampling, dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai objek yang diteliti peneliti.

Untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Simpang Empat Empat Kabupaten Asahan, maka peneliti memilih orang-orang yang mengetahui dan terlibat langsung dalam objek yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini meliputi:

a. Informan kunci

Informan kunci ialah subjek yang mengetahui serta memahami tentang informasi penting dalam hal permasalahan serta objek yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini ialah Ibu Dewi Susanti selaku Koordinator PKH dan Pendamping Sosial Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan.

b. Informan utama

Informan utama merupakan orang-orang yang ikut serta dan mengalami secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Adapun Informan utama dalam penelitian ini ialah Bapak Dodi Riza Pohan, S.T selaku Kepala Desa Simpang Empat dan Bapak Ahmad Fauji, A.Md.Kom selaku Sekretaris Desa Simpang Empat.

c. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan orang-orang yang benar-benar memberikan informasi maupun data meskipun mereka tidak ikut serta secara langsung dalam hal yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan ialah ibu Latifah dan Ibu Timah selaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Ibu Rina selaku Masyarakat Desa Simpang Empat.

Tabel 6. Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Kunci	Kordinator PKH Kecamatan	Ibu Dewi Susanti
2.	Kunci	Pendamping Sosial	Ibu Dewi Susanti
3.	Utama	Kepala Desa Simpang Empat	Bapak Dodi Riza Pohan, S.T
4.	Utama	Sekretaris Desa Simpang Empat	Bapak Ahmad Fauji, A.Md, Kom
5.	Tambahan	Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Simpang Empat	Ibu Timah
6.	Tambahan	Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Simpang Empat	Ibu Latifah
7.	Tambahan	Masyarakat	Ibu Rina
Jumlah			7

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, karena proses pengumpulan data inilah yang menjadi dasar penyusunan aplikasi penelitian. Proses pengumpulan data yang baik akan menghasilkan data yang mempunyai integritas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, proses pendataan tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan baik. Dalam penelitian kualitatif, ada tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan studi kasus tentang kegiatan pengamatan dan survey langsung ke lokasi penelitian kemudian dijadikan suatu objek kajian

penelitian. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:203) observasi merupakan suatu proses biologis dan psikologis. Dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan proses pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh setiap peneliti terhadap objek yang akan diteliti melalui pencatatan secara sistematis. Peneliti akan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang bertempat tinggal di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi yang berfokus pada masalah yang sedang diteliti dengan proses tanya jawab secara langsung antara dua orang atau lebih. Menurut Sanusi (2011:105) wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik pengumpulan wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan zoom meeting. Peneliti akan melakukan wawancara di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan untuk mendapatkan data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk catatan suatu peristiwa yang telah terjadi, berupa gambar, dokumen, tulisan, rekaman, atau karya-karya seseorang yang ada di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan. Dokumentasi menurut Arikunto (2016:158) ialah mencari data terkait hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Dokumentasi ini menjadi bukti resmi yang harus dipertanggungjawabkan. itu, peneliti juga menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan-pertanyaan wawancara.

3.6 Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan teknik untuk mengolah data menjadi informasi relevan sehingga mempermudah dalam menganalisis data yang diperoleh. Tujuan teknik analisis data adalah untuk mendapatkan kesimpulan keseluruhan dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman dalam Saldana (2014:31-33) menyebutkan bahwa didalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah dalam teknik analisis data kualitatif, karena terdapat banyak data yang diperoleh dari survei lapangan. Yang kemudian digabungkan menjadi satu bagian dan merangkum setiap masalah yang ditemukan di lapangan secara rinci. Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih, dan memfokuskan hal-hal yang paling penting, dan mencari tema yang utama, sekaligus menyederhanakan data yang diperoleh lapangan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data dalam teknik analisis data penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, keterkaitan anatar kategori, dan sebagainya. Pada tahap penyajian ini, peneliti menggolongkan atau mengelompokkan data tersebut ke dalam penggolongan tertentu setelah data diterima di lapangan dan data tersebut diberi tanda khusus. Oleh karena itu, penggolongan data juga memudahkan dalam mengidentifikasi data yang paling penting dan paling tidak penting dalam tahap reduksi, sehingga peneliti dapat mengategorikan data yang terkumpul.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarik kesimpulan atau verifikasi diambil setelah dua tahap sebelumnya sehingga penulis dapat mencari dan menemukan masalah yang muncul di lapangan. Pada tahap kesimpulan ini, peneliti mencatat keteraturan, pola-pola penjelas, alur kausalitas, proposisi, dan konfigurasi. Selama melakukan penelitian di lapangan penulis melakukan tahapan kesimpulan secara terus menerus. Kemudian data tersebut menjadi data yang valid dan tepat dituliskan dalam kesimpulan. Langkah ini juga dilakukan sampai berakhirnya peneliti di lapangan dan mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Program Keluarga Harapan untuk mengurangi kemiskinan di Desa Simpang Empat belum sepenuhnya efektif, meskipun telah mematuhi petunjuk teknis (Juknis) yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh komunikasi yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman keluarga penerima manfaat tentang Program Keluarga Harapan, serta kurangnya sosialisasi antara kordinator PKH dan pendamping sosial. Kemudian Sumber daya sudah sangat memadai. Posisi pelaksana (Disposisi) sudah memadai, karena pada saat proses distribusi dana para pendamping mengumpulkan langsung peserta PKH di lokasi pencairan dana. Kemudian struktur birokrasi cukup memadai karena pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Struktur organisasi program terdiri dari Kepala Dinas Sosial Asahan, dua Koordinator PKH Kabupaten/Kota, satu Koordinator Kecamatan, dan empat Pendamping Sosial. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan di Desa Simpang Empat yaitu pihak pelaksana mengalami kesulitan untuk mempekerjakan keluarga penerima manfaat program PKH yang sudah mampu, data calon penerima program PKH tidak valid sehingga perlu melakukan pendataan ulang, proses pencairan dana bantuan program keluarga harapan (PKH) tidak dilakukan dengan tepat waktu.

5.2 Saran

1. Tim pelaksana PKH Desa Simpang Empat tidak hanya memberi tahu peserta PKH tentang program PKH, tetapi juga kepada pihak lain seperti Dinas Sosial, Kordiniator PKH, Pendamping Sosial, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar program PKH mendapat dukungan dari masyarakat yang besar dan penerima manfaatnya tepat sasaran.
2. Dalam proses pendataan peserta penerima PKH di Desa Simpang Empat harus diperbarui dengan benar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi populasi yang seharusnya memenuhi syarat sebagai penerima Program PKH tetapi belum mendapatkannya. Sehingga kecemburuan yang menyebabkan konflik di antara masyarakat dapat dikurangi.
3. Keluarga Penerima Manfaat harus terus mencari pekerjaan atau sumber penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka tidak boleh menggunakan bantuan PKH ini hanya untuk membayar biaya hidup. Pakailah bantuan tersebut sesuai dengan instruksi.
4. Proses pencairan dana bantuan program PKH seharusnya dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan. Keluarga penerima manfaat sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi biaya hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Kurniawan, Ade, Lukmanul Hakim, and Rachmad Ramdani. (2021). "Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Karawang Barat." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 040-051.
- Mellani, Wpp. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 10-13.
- Nawi, Rusdin. (2018). Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Universitas Satria Makassar*, 22-25.
- Sinurat, Tigor Albert Josua. (2023). "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Harianja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.", 56-58.
- Sasmito, Cahyo, and Ertien Rining Nawangsari. (2019). "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu" *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 68-74.
- Kadji, Yulianto. (2012). "Kemiskinan dan Konsep teoritisnya." *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG*, 1-7.

Buku

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Yogyakarta
- Amelia, R. (2012). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan.". Bogor.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Buku Panduan Pedoman Program Keluarga Harapan, (2017).
- Buku Panduan Pedoman Program Keluarga Harapan, (2021)..
- Edwards III. G. C. (2006). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc.
- Hermawan, Iwan. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Hidayatul Quran Kuningan. Kuningan.
- Meleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014:31-33). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohidi, UI-Press. USA.
- Mulyadi, Deddy, (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN*. Jarnasy. Yogyakarta.
- Sutrisno, Hadi. (2015:203). *Metodologi Research*. Jilid 1, 2, UGM. Sebagaimana dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". CV. Alfabeta, Bandung.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI dan Puslit. Bandung.
- Tangkilisan. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. YPAPI. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. (2014). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo. Yogyakarta.

Skripsi :

- Desi Pratiwi. (2020). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro.
- Kholif, Khodziah Isnaini. (2014). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawar blandong Kabupaten Mojokerto*. Diss. Brawijaya University.
- Rahma, Fikaaulia. (2022) *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi*. Diss. Universitas Islam" 45" Bekasi.
- Suyanti. (2021). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)*.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kemiskinan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Program Keluarga Harapan

Website (Internet) :

BPS. (2022) Jumlah Penduduk Miskin 2021-2023 di Sumatera Utara <https://sumut.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

BPS. (2022) Jumlah Penduduk Desa Simpang Empat Asahan 2022-2023 di Kabupaten Asahan. <https://asahankab.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

PPN/Bappenas. (2019) Siaran Pers Membedah Angka Kemiskinan Terkini <https://www.bappenas.go.id/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.



LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

a. Identitas diri (**Informan Inti dan Informan Utama**)

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari/ Tanggal :

b. Pertanyaan Penelitian:

Komunikasi

1. Bagaimana cara pendamping PKH dalam mensosialisasikan Permensos No. 1 Tahun 2018 kepada keluarga penerima manfaat?
2. Bagaimana proses pendataan calon penerima program keluarga harapan?
Sumber

Sumber Daya

1. Apakah penerima manfaat program keluarga harapan PKH sudah tepat sasaran?
2. Bagaimana dengan sarana dan prasarana penunjang dalam program keluarga harapan di Desa Simpang Empat apakah sudah memadai?

Disposisi (Sikap Pelaksana)

1. Apakah para pelaksana kebijakan sudah paham terhadap program keluarga harapan yang akan dilakukan?
2. Apakah ada pendampingan langsung oleh pelaksana kebijakan kepada keluarga penerima manfaat pada saat menerima bantuan program keluarga harapan?

Struktur Birokrasi

1. Apakah ada SOP atau aktivitas terencana rutin dalam melakukan program keluarga harapan?
2. Bagaimana struktur organisasi program keluarga harapan?

Faktor Penghambat

1. Apa faktor penghambat dari proses implementasi program keluarga harapan di Desa Simpang Empat?

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

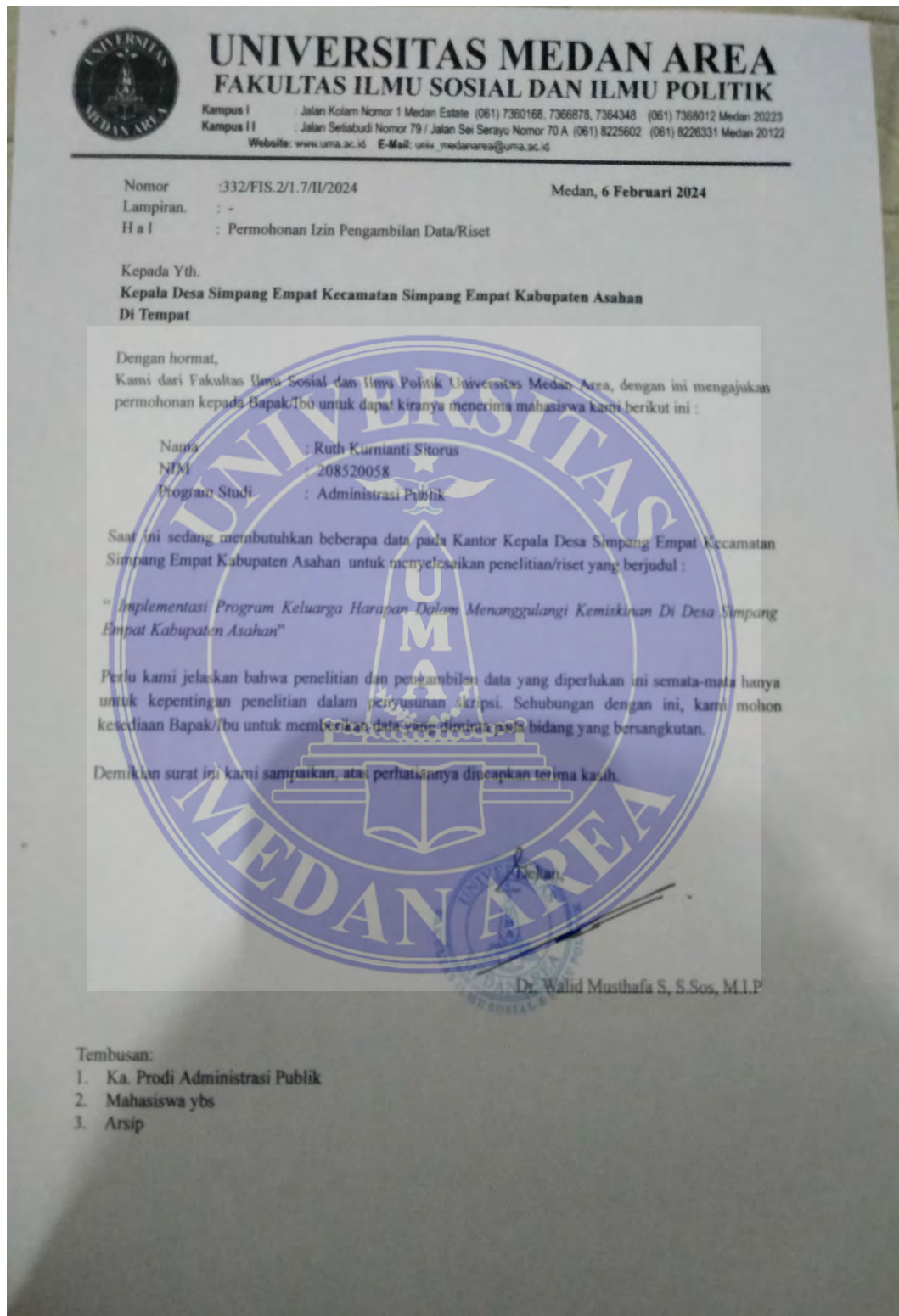
a. Identitas diri (Informan Tambahan)


1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari/ Tanggal :

b. Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana cara pendamping PKH dalam mensosialisasikan Permensos No. 1 Tahun 2018 kepada keluarga penerima manfaat?
2. Bagaimana proses pendataan calon penerima program keluarga harapan?
3. Apakah penerima manfaat program keluarga harapan PKH sudah tepat sasaran?
4. Bagaimana dengan sarana dan prasarana penunjang dalam program keluarga harapan di Desa Simpang Empat apakah sudah memadai?
5. Apakah para pelaksana kebijakan sudah paham terhadap program keluarga harapan yang akan dilakukan?
6. Apakah ada pendampingan langsung oleh pelaksana kebijakan kepada keluarga penerima manfaat pada saat menerima bantuan program keluarga harapan?
7. Apa faktor penghambat dari proses implementasi program keluarga harapan di Desa Simpang Empat?

Lampiran 2. Surat Izin Peneliti



 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360166, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 332/FIS.2/1.7/II/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 6 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Ruth Kurnianti Sitorus
NIM : 208520058
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Kepala Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diperlukan pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P.

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

Lampiran 3. Surat Keterangan Pelaksanaan Riset



Lampiran 4. Deskripsi Hasil Wawancara

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SIMPANG EMPAT

Identitas Responden 1 (Informan Kunci)

1. Nama : Dewi Susanti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Jabatan : Koordinator Kecamatan dan Pendamping Sosial
4. Informan : Kunci
5. Hari/ Tanggal : Kamis 25 April 2024

a. Komunikasi

1. Bagaimana cara pendamping PKH dalam mensosialisasikan Permensos No. 1 Tahun 2018 kepada keluarga penerima manfaat?

Jawab : “Bentuk sosialisasi kami ya dengan mengadakan pertemuan kelompok keluarga penerima manfaat PKH saja tidak ada bentuk sosialisasi antara pemerintah daerah dengan kordinator dan pendamping sosial. Biasanya dilakukan rumah keluarga penerima manfaat tersebut. Biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali sebelum dana bantuan PKH keluar. Nanti kami beritahu kepada setiap keluarga penerima manfaat bahwasanya bantuan PKH ini bantuan bersyarat dari pemerintah yang akan diberikan kepada keluarga yang kurang mampu baik dari bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.”

2. Bagaimana proses pendataan calon penerima program keluarga harapan?

Jawab : “Biasanya turun dari Kementerian Sosial yaitu dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dimana data ini diperoleh dari Dinas Pencatatan Sipil langsung diberi ke Koordinator PKH kemudian diarahkan ke Pendamping Sosial setelah itu dilaporkan ke Kantor Desa. Nah, nanti akan di verifikasi validasi. Kemudian kita terjun ke lapangan untuk melihat apakah nama yang bersangkutan layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Tapi, kalau sekarang pemerintah sudah memudahkan masyarakat yang kurang mampu agar bisa mendaftarkan

sendiri untuk menerima bantuan PKH ini melalui website cek bansos maupun dari aplikasi cek bansos. Kita juga bisa mengetahui apa kita dapat bantuan PKH. Kita juga sering menemukan dilapangan banyak masyarakat yang dari kelompok keluarga kurang mampu sudah mendaftarkan diri namun memenuhi syarat sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH, begitu juga sebaliknya ada masyarakat mendaftarkan diri sebagai keluarga kurang mampu untuk menerima PKH tidak memenuhi syarat malah ditetapkan jadi penerima calon PKH. Disini kami kurang tau dimana masalahnya sehingga menyebabkan kecemburuan.”

b. Sumber Daya

1. Apakah penerima manfaat program keluarga harapan PKH sudah tepat sasaran?

Jawab : “Untuk tepat sasaran ya menurut saya tepat ke keluarga yang kurang mampu bisa dilihat sendiri datanya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kemudian kita lakukan pemutakhiran data. Penerima PKH lansia yang sudah berumur 75 tahun, Ibu hamil yang suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang memiliki anak 4, anak sekolah yang minim dengan biaya uang sekolah dikarenakan orangtua hanya bekerja sebagai pelaut. Itu perlu diberi bantuan sih. Namun, ada juga keluarga penerima manfaat PKH dulunya keluarga kurang mampu seiring berjalannya waktu ekonomi kehidupannya membaik dikarenakan anak-anak mereka sudah bekerja dan mampu memberi penghasilan ke keluarga masih menerima bantuan PKH. Nah, disini kami juga kebingungan untuk mengatasinya karena akan menimbulkan isu kecemburuan terhadap keluarga yang kurang mampu. Tapi, kami sudah mengkordinasikan ke dinas sosial agar bisa diatasi dan digantikan dengan keluarga penerima manfaat PKH yang baru yang memang benar-benar mampu.”

2. Bagaimana dengan sarana dan prasarana penunjang dalam program keluarga harapan di Desa Simpang Empat apakah sudah memadai?

Jawab : “Kalau sarana untuk mendapatkan bantuan bersyarat ini ya sudah cukup baik. Dimana awal dibentuknya kebijakan ini keluarga penerima manfaat untuk mengambil uang harus ke Kantor Pos dulu dengan membawa KTP. Nah, disana akan dicek betul-betul oleh pihak pos nya. Kalau sekarang sudah berbeda mereka sudah diberikan kartu seperti kartu ATM berwarna merah namanya kartu sejahtera keluarga. Nah, mereka nanti sudah bisa mengambil ke BRILink maupun di Bank. Kalau terkait prasarana ya sudah memadai juga, dimana ketika kami mau mengadakan sosialisasi diberikan buku yang berganti-ganti karna setiap pertemuan kami membahas materi yang berbeda-beda agar mereka yang menerima manfaat mendapatkan lebih banyak pemahaman.”

c. Disposisi

1. Apakah para pelaksana kebijakan sudah paham terhadap program keluarga harapan yang akan dilakukan?

Jawab : “Untuk pendampingan kita selalu mendampingi keluarga penerima manfaat PKH mulai dari penyusunan berkas hingga pencairan dana yang dilakukan di BANK atau BRILink. Karena untuk memudahkan para ibu rumah tangga dalam mendapatkannya. Biasanya setelah pencairan kita akan memberi sedikit motivasi terkait uang ini nantinya akan digunakan kemana. Biasanya kita menyarankan ke ibu rumah tangga agar uangnya dikelola untuk keperluan pendidikan anak sekolah kemudian untuk biaya kesehatan untuk sisanya kita ajarkan untuk mengelolanya dengan membuka usaha kecil-kecilan di rumah agar uang tadi berputar.

2. Apakah ada pendampingan langsung oleh pelaksana kebijakan kepada keluarga penerima manfaat pada saat menerima bantuan program keluarga harapan?

Jawab : "Ketika pencairan dana PKH kepada penerima, Petugas PKH bisanya memberikan informasi kepada Pihak Kecamatan, bahwa akan dilakukan pencairan dana biasanya

dilakukan secara bertahap gak sekali semua nominalnya diberi, kemudian mereka dikumpulkan di bank BRI maupun di Kantor Pos berdasarkan kelompoknya.”

d. Struktur Birokrasi

1. Apakah ada SOP atau aktivitas terencana rutin dalam melakukan program keluarga harapan?

Jawab : “Untuk prosedur PKH ini dimulai dari pengguna layanan terdaftar yang akan di berikan kegiatan penyerahan data dari Kementerian Sosial kemudian diadakan rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan pertemuan awal serta validasi. Setelah itu melaksanakan rapat koordinasi persiapan dan pelaksanaan pertemuan awal serta validasi, kemudian pelaksanaan mengadakan pertemuan kelompok untuk mengidentifikasi status KPM terbaru serta pemutakhiran data kemudian kunjungan verifikasi kehadiran KPM ke faskes dan faskes. Setelah itu Pelaksana PKH mengkroscek kesesuaian data KPM dan melaporkan hasil validasi data ke Dinas Sosial serta menetapkan hasil kroscek data. Selanjutnya pelaksana PKH melaporkan hasil data kepada PKH pusat. Habis itu mereka melaksanakan penyaluran bantuan ke KPM dan rekonsiliasi dengan lembaga bayar serta monev. Dan mereka akan resertifikasi peserta PKH dalam mengukur tingkat sosial ekonomi pendamping dan graduasi peserta PKH serta mengintervensi KPM melalui program pemberdayaan dan program komplementaritas lainnya. Setiap pelaksana program keluarga harapan memiliki bidang masing-masing dalam mengerjakannya.”

2. Bagaimana struktur organisasi program keluarga harapan?

Jawab : “Struktur organisasi kita ada pengarah (Kepala Dinas Sosial), ketua uppkh (Kabid Sosial), Sekretaris (Kasie Sosial), dua Koordinator PKH Kota Kisaran, dua puluh empat Kordinator Kecamatan, lima puluh lima pendamping sosial dan anggota lainnya.”

Faktor Penghambat

1. Apa faktor penghambat proses implementasi program keluarga harapan di Desa Simpang Empat?

Jawab : .“Faktor yang menghambatnya ya masyarakat

penerima manfaat PKH kurang paham dengan sosialisasi program PKH yang kami berikan sehingga mempersulit kami dalam memberikan pemahaman, kemudian dalam hal pendidikan masih banyak anak sekolah yang duduk di bangku SMP dan SMA enggan bersekolah dengan alasan tempat sekolah terlalu jauh untuk diakses dan tidak ada motivasi orangtua juga lingkungan membuat anak malas sekolah. Lalu, bidang kesehatan masih banyak keluarga penerima manfaat tidak melakukan cek kesehatan karena tempat pelayanan kesehatan jauh sehingga mengakibatkan operasional menjadi mahal, ya seperti ongkos transportasi dan akses jalan yang rusak.



Identitas Responden 2 (Informan Utama)

1. Nama : Dodi Riza Pohan, S.T
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Kepala Desa Simpang Empat
4. Informan : Utama
5. Hari/ Tanggal : Rabu 24 April 2024

a. Komunikasi

1. Bagaimana cara pendamping PKH dalam mensosialisasikan Permensos No. 1 Tahun 2018 kepada keluarga penerima manfaat?

Jawab : “Sosialisasi merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada keluarga penerima manfaat dalam menanggulangi kemiskinan. Nah, sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh kordinator PKH kepada pendamping PKH tersebut biasanya jadwal sosialisasi ini setiap bantuan PKH mau keluar selalu dibuat jadwal untuk mengadakan sosialisasi agar keluarga penerima manfaat mengerti arah tujuan program keluarga harapan ini kemana.

2. Bagaimana proses pendataan calon penerima program keluarga harapan?

Jawab : “Untuk pendataan ya dari pusat. Tapi sih sekarang bisa aja dilakukan sendiri atau diajukan ke perangkat desa. Nanti kami yang akan melakukan verifikasi validasi.”

b. Sumber Daya

1. Apakah penerima manfaat program keluarga harapan PKH sudah tepat sasaran?

Jawab “Kami pastikan sudah tepat sasaran, karena penerima PKH tidak serta merta disarankan langsung diterima oleh peserta PKH, tetapi akan dirapatkan lagi lalu dikonfirmasi jika memang layak menerima PKH, biasanya akan ada foto rumah dan penghasilan.”

2. Bagaimana dengan sarana dan prasarana penunjang dalam program keluarga harapan di Desa Simpang Empat apakah sudah memadai?

Jawab : “Kalau masalah sarana dan prasarana ya sudah memadai. Sarana ya seperti kartu keluarga sejahtera dia berwarna merah. Itu

diberikan kepada keluarga penerima manfaat guna agar mereka menerima uang melalui kartu tersebut. Kalau prasarana ya ada diberikan seperti buku bimbingan yang setiap pertemuan akan diberikan.”

c. Disposisi

1. Apakah para pelaksana kebijakan sudah paham terhadap program keluarga harapan yang akan dilakukan?

Jawab : "Pendampingan selalu ada dilakukan oleh pelaksana PKH agar para keluarga penerima manfaat mendapatkan haknya sebagai penerima program PKH."

2. Apakah ada pendampingan langsung oleh pelaksana kebijakan kepada keluarga penerima manfaat pada saat menerima bantuan program keluarga harapan?

Jawab : “Untuk pencairan dana biasanya dilakukan di Bank atau pun di BRILink tergantung pendamping PKH.”

d. Struktur Birokrasi

1. Apakah ada SOP atau aktivitas terencana rutin dalam melakukan program keluarga harapan?

Jawab : “Untuk jadwal kegiatan biasanya gak ada dijadwalkan biasanya dilakukan secara tiba-tiba ketika dana mau keluar dan disitu kordinator dan pendamping berkordinasi untuk mengatur jadwal pertemuan kelompok dengan keluarga penerima manfaat. Setelah setelah mengadakan pertemuan kelompok tadi kordinator dan pendamping PKH membuat laporan kegiatan ke Dinas Sosial. Mereka juga akan memberikan data nama penerima manfaat kepada setiap Kordinator PKH tadi dan mereka juga memberikan informasi terkait tahap keberapa yang keluar bulan ini kemudian mereka juga memberikan nominal tahap bulan ini biasanya Rp 300.000. Nominalnya biasanya berbeda-beda tergantung kategorinya.” Nah, setelah itu mereka akan diberi pelatihan khusus untuk pembinaan lagi mengenai kemajuan tersebut.

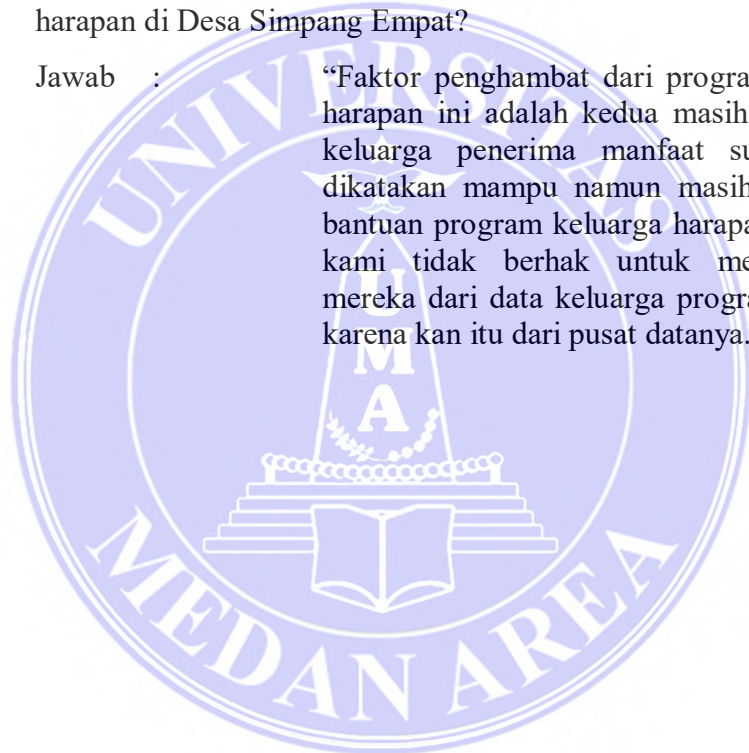
2. Bagaimana struktur organisasi program keluarga harapan?

Jawab : “Untuk bagan organisasi PKH seperti yang ada diwebsite Dinsos Asahan yang pertama Kepala Dinas Sosial, Sekretaris, 2 Kordinator PKH Kota Kisaran, 24 Kordinator Kecamatan, terdapat juga 55 Pendamping Sosial setiap desa dan masing-masing bidang lainnya kemudian dibawah turunannya ada pegawai pelaksana.”

Faktor Penghambat

1. Apa faktor penghambat proses implementasi program keluarga harapan di Desa Simping Empat?

Jawab : “Faktor penghambat dari program keluarga harapan ini adalah kedua masih ditemukan keluarga penerima manfaat sudah dapat dikatakan mampu namun masih menerima bantuan program keluarga harapan sehingga kami tidak berhak untuk mengeluarkan mereka dari data keluarga program harapan karena kan itu dari pusat datanya..”



Identitas Responden 3 (Informan Utama)

1. Nama : Ahmad Fauji, A.Md, Kom
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Sekretaris Desa Simpang Empat
4. Informan : Utama
5. Hari/ Tanggal : Jumat 27 April 2024

a. Komunikasi

1. Bagaimana cara pendamping PKH dalam mensosialisasikan Permensos No. 1 Tahun 2018 kepada keluarga penerima manfaat?

Jawab : “Ya sosialisasi pasti ada. Setau saya sebulan sekali.”

2. Bagaimana proses pendataan calon penerima program keluarga harapan?

Jawab : “Setau saya sih proses pendataannya dari Kementerian Sosial tapi gak tau betul apa enggak nya. Kemudian mereka akan mendata ulang nama calon penerima PKH ke lapangan.”

b. Sumber Daya

1. Apakah penerima manfaat program keluarga harapan PKH sudah tepat sasaran?

Jawab : “Kalau dilihat dari semua kriteria ya sudah terpenuhi dan tepat sasaran, dikarenakan data kita dari Dinas Sosial langsung turun ke lapangan mendata masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Nanti disitu kita melihat kondisi ekonominya, layak atau tidak dia mendapatkan bantuan tersebut.”

2. Bagaimana dengan sarana dan prasarana penunjang dalam program keluarga harapan di Desa Simpang Empat apakah sudah memadai?

Jawab : “Sejauh ini sih untuk sarana dan prasarana yang diberikan sudah sangat memadai. Jika tidak memadai kemungkinan besar para keluarga penerima manfaat yang akan bisa mendapatkan dananya ya. Kami juga sudah memberikan kartu keluarga sejahtera berwarna

merah nah melalui itu lah para penerima manfaat mengambil dana nya

c. Disposisi

1. Apakah para pelaksana kebijakan sudah paham terhadap program keluarga harapan yang akan dilakukan?

Jawab : “Pendampingan wajib dilakukan kepada penerima PKH karena untuk memastikan bahwa bantuan PKH diterima langsung oleh keluarga penerima PKH tersebut”.

d. Struktur Birokrasi

1. Apakah ada SOP atau aktivitas terencana rutin dalam melakukan program keluarga harapan?

Jawab : “Untuk program inikan ada beberapa pihak yang terlibat yang pertama Kemensos kalau di daerah dinsos, pihak bank dan pos, sekolah dan puskesmas. Nah, untuk pelaksanaannya tiap aktor punya peranannya masing-masing. Mereka akan bekerja sama supaya pelaksanaan program keluarga harapan ini lebih baik.”

Faktor Penghambat

1. Apa faktor penghambat proses implementasi program keluarga harapan di Desa Simpang Empat?

Jawab : “Faktor penghambatnya ya dari data calon penerima manfaat yang kurang valid. Data calon penerima manfaat yang turun dari Kementerian Sosial dijalankan oleh pelaksana program keluarga harapan (PKH), akan tetapi data yang diberikan oleh pusat belum tentu benar dan para pelaksana program keluarga harapan (PKH) harus mencari data lagi.”

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Bersama Informan Kunci yaitu Ibu Dewi Susanti Selaku Kordinator PKH dan Pendamping Sosial di Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan, Pada Kamis 25 April 2024



Dokumentasi Bersama Informan Utama Bapak Dodi Riza Pohan, S.T selaku Kepala Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan Pada Rabu 24 April 2024



**Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ahmad Fauji A.Md, K.om
selaku Sekretaris Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan Pada
Jumat 27 April 2024**



**Dokumentasi wawancara bersama Informan Tambahan yaitu Ibu
Timah Selaku Keluarga Penerima Manfaat Program PKH di
Desa Simpang Empat, Pada Senin 29 April 2024**



Dokumentasi wawancara bersama Informan Tambahan yaitu Ibu Rina Selaku Masyarakat di Desa Simpang Empat Pada Senin 29 April 2024



Dokumentasi wawancara bersama Informan Tambahan yaitu Ibu Latifah Selaku Keluarga Penerima Program PKH di Desa Simpang Empat Pada Senin 29 April 2024



**Dokumentasi Pendamping Sosial PKH yaitu Ibu Dewi Susanti
Melakukan Pendampingan Pencaira Dana PKH Kepada
Keluarga Penerima Manfaat Program PKH
di Desa Simpang Empat**



**Dokumentasi Pertemuan Kelompok Keluarga Penerima Program
PKH di Desa Simpang Empat dilakukan setiap bulan
pada tanggal 17 April 2024**